

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan merupakan problematika utama yang terdapat berbagai jenis dimensi yang menjadikan suatu objek dalam setiap masalah. Permasalahan kemiskinan merupakan suatu situasi yang tidak diharapkan bagi sebagian besar masyarakat umum untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kehadiran pemerintah dapat membantu dalam penanggulangan permasalahan sosial dan ekonomi merupakan suatu upaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan pada sektor kehidupan masyarakat yaitu kemiskinan (Nurmalisa, 2017).

Permasalahan kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu hadir ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Rohmaniyanti (Subu, 2021) faktor penyebab timbulnya kemiskinan diantaranya keterbatasan secara fisiknya dan mental, keterbatasan keterampilan dan pendidikan, malasnya keinginan untuk berusaha dan minimnya lapangan kerja. Kemiskinan akan hadir dalam tengah kehidupan bermasyarakat disebabkan karena ketidakmampuan yang dialami oleh seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhan primer seperti sandangan pangan dan papan, tidak memiliki akses yang baik dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, air bersih dan transportasi. Permasalahan kemiskinan akan sering muncul pada daerah perkotaan untuk menjadi tempat mengadu nasib dalam perekonomian.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 - 2021**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)
1.	2019	3.743,23
2.	2020	3.980,90
3.	2021	4.109,75

Sumber: BPS Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2018 sebesar 3.897,20 juta jiwa penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 3.743,23 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2020 mencapai tahun 3.980,90 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 4.109,75 juta jiwa penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin, maka berpengaruh besar pada terjadinya Penjadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Handayani & Maruf, 2019).

Kemiskinan dan PMKS memiliki kaitan yang erat antar satu sama lain yang menjadi sebuah permasalahan sosial yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri dan mengeksploitasi anak untuk mengemis, berjualan koran dijalan bahkan menggelandang karena tidak mempunyai rumah sebagai tempat tinggal (Yuniningsih, 2022). Selain itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Harso Susilo S.T, M.M dari berita Gantra.com (09/03/2020)

menyatakan bahwa “penyebab PMKS antara lain karena kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan, serta tindak kekerasan.”. Permasalahan ini disebabkan juga karena banyak para pendatang yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, banyak pendatang yang mengalami kegagalan dalam bersaing untuk mencari pekerjaan yang layak. Sehingga, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan yang menimbulkan adanya tuna kualitas menjadikan ketidakmampuan untuk dapat bertarung dalam kehidupan. Hal ini berdampak mereka memiliki peluang untuk mencari pekerjaan yang instan dan tanpa kemampuan mengindikasikan untuk menjadi PMKS seperti anak jalanan, wanita tuna Susila, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, gelandangan dan pengemis (Tambunan & Tambunan, 2019).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mencari tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah PMKS yang selalu hadir di tengah masyarakat, maraknya PMKS dapat menimbulkan terjadinya kerawanan sosial dan akan menggelisahkan ketertiban serta keamanan yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya kehadiran PMKS tersebut, maka akan menyebabkan adanya permasalahan sosial lainnya seperti pelecehan seksual dan eksploitasi pada anak (Sihombing et al., 2020). Berikut jumlah PMKS ataupun PPKS di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah
1.	2019	3.042.030
2.	2020	4.056.054
3.	2021	4.654.151

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa jumlah PMKS pada Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika dilihat lebih rinci pada tahun 2018 jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah mencapai 4.089.371 orang. Pada tahun 2019 jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah mencapai 3.042.030 orang. Pada tahun 2020 jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah mencapai 4.056.054 orang. Hal ini dapat diketahui pada tahun 2021 jumlah PMKS Provinsi Jawa Tengah mencapai 4.654.151 orang.

Menurut Hapsari (dalam Anggrain & Mashur, 2019) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan suatu individu maupun kerabat yang mempunyai kesulitan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial dan tidak memiliki kemampuan hubungan yang baik, sehingga memiliki ketidakmampuan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti jasmani, rohani, dan sosial. Fenomena PMKS ini tidak terlepas dari isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial yang terdapat tujuh strategis, permasalahan dari kesejahteraan sosial yaitu, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, anak balita terlantar dan gelandangan dan pengemis ataupun tunawisma.

Dengan merujuk dari peraturan tersebut, isu permasalahan kesejahteraan sosial yang dapat diketahui pada kehidupan sehari – hari kita menemukan istilah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang temukan pada sekitar jalanan. Kondisi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar ini kebanyakan dijumpai pada seluruh wilayah terutama daerah perkotaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi persoalan utama dari timbulnya Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar. Kehadiran PGOT ini merupakan suatu fenomena yang penting untuk dikaji mendalam karena populasi mereka yang selalu menjadi problematika pada tiap tahunnya menjadikan keresahan tersendiri bagi lingkungan kehidupan bermasyarakat.

**Tabel 1.3 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2021**

No	Jenis PMKS	2019	2020	2021
A. Ketelantaran				
1.	Anak Balita Terlantar	934	3.782	1.969
2.	Anak Terlantar	7.696	352	10.620
3.	Lanjut Usia Terlantar	40.014	91.522	79.963
B. Ketunaan Sosial				
1.	Gelandangan	520	584	548
2.	Pengemis	998	998	865
TOTAL		50.162	97.238	93.965

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang berada pada Provinsi Jawa Tengah selama 2019 – 2021 yaitu Pada tahun 2021 terdapat anak balita terlantar sebesar 1.969 jiwa, anak terlantar sebesar 10.620 jiwa dan lanjut usia terlantar sebesar 79.963 jiwa, gelandangan sebesar 548 jiwa dan pengemis 865 jiwa. Apabila dilihat dari tabel tersebut, jumlah anak terlantar, anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Dengan jumlah yang mengalami tentunya tidak akan terlepas bahwa PGOT ini akan menimbulkan permasalahan sosial lainnya yang dapat menyebabkan ketidakaturan sosial yang terjadi pada masyarakat seperti tidak tertib dan mengganggu pemandangan kota maupun daerah yang

disinggahi dari orang jalanan tersebut (Bharoto & Nursahidin, 2021). Sehingga, hal ini membutuhkan intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan populasi jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang selalu hadir di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mengetaskan permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) ini diperlukan upaya pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagai bentuk penanganan PGOT. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai peranan yang penting dalam merumuskan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa “Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.” Dengan adanya rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan dan pengembangan seluruh keahlian seseorang yang mengalami disfungsi sosial sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosial dengan baik.

Kebijakan penanganan permasalahan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar ini secara umum memiliki tujuan untuk untuk mengembalikan mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Spesifiknya dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 ayat 1 bahwa ditunjukkan untuk dapat mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosisa serta memberikan dan

peningkatan keterampilan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan untuk dapat berupaya dalam melakukan pembauran melalui dirinya bersama dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, pemerintah menyediakan berbagai lembaga, balai ataupun panti sosial sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial melalui balai rehabilitasi sosial untuk mengatasi permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 pasal 12 ayat 2 dijelaskan bahwa program rehabilitasi sosial dilaksanakan, salah satunya adalah UPT, panti sosial dan/atau LKS. Panti Sosial ini hadir sebagai lembaga pelayanan rehabilitasi sosial bagi setiap para PGOT untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dan mampu berperan serta pembangunan secara spesifik terutama bagi diri sendiri dan keluarga. Jenis Panti Pelayanan Sosial yang dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mengatasi permasalahan sosial tersebut yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. dijelaskan bahwa terdapat Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan Panti Sosial Pelayanan Kelas B pada pasal 2 yang diantaranya terdiri atas yaitu sebagai berikut.

a. Panti Pelayanan Sosial Kelas A, yaitu sebagai berikut.

1. Panti Pelayanan Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo

2. Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri;
 3. Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya;
 4. Panti pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu;
 5. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring;
 6. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede;
 7. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo;
 8. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Pendowo;
 9. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan;
 10. Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama;
 11. Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha;
 12. Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera;
 13. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo;
 14. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata;
 15. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Raharjo;
 16. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti;
 17. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara;
 18. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata;
 19. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi;
 20. Panti Pelayanan Sosial PMKS Margo Widodo.
- b. Panti Pelayanan Sosial Kelas B, yaitu sebagai berikut.
1. Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra
 2. Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo;
 3. Panti Pelayanan Sosial Anak Suko Mulyo;

4. Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso;
5. Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri;
6. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran;
7. Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu

Oleh karena itu, terdapat 27 jenis panti dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan B. Panti sosial yang melakukan penanganan PMKS yang hanya berfokus pada Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar adalah Panti Pelayanan PGOT Mardi Utomo Semarang. Panti Pelayanan Sosial ini merupakan institusi pemerintahan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Panti sosial ini termasuk Panti Pelayanan Kelas A yang dapat mampu memberikan pelayanan sosial melalui pendekatan pekerja sosial. Melalui Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, mereka memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang Rehabilitasi Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dalam rangka memberikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar. Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo mempunyai peranan yang besar dalam mendukung para pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) dalam memecahkan masalah mereka dan dapat beradaptasi pada perkembangan teknologi dan informasi yang dialami saat ini. Program ini

mencakup bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang diterapkan dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4 Program Rehabilitasi Sosial Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo

No.	Program – Program Rehabilitasi	Kegiatan	Output
1.	Motivasi dan Diagnosis Psikososial	Bimbingan Mental Psikososial 1. Bimbingan Psikologis 2. Bimbingan Kedisiplinan dan Budi Pekerti	Menumbuhkan dan membantu kondisi psikis/kepribadian penerima manfaat seperti: 1. Memiliki kemampuan pengendalian diri 2. memiliki perilaku disiplin dan berbudi pekerti yang baik.
2.	Perawatan dan Pengasuhan	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 1. Kebutuhan Dasar Makan Minum 2. Kebutuhan Dasar Sandang 3. Kebutuhan Dasar Papan 4. Kebutuhan Dasar Kebersihan Diri dan Lingkungan	Terpenuhinya kebutuhan makan minum sesuai standar gizi kesehatan. Terpenuhinya kebutuhan sandar sesuai standar. Terpenuhi kebutuhan hunian. Terpenuhinya kebutuhan hunian.
3.	Pelatihan Keterampilan dan Pembinaan Kewirausahaan	1. Bimbingan Keterampilan Pertanian. 2. Bimbingan Keterampilan Pertukangan Kayu	Terciptanya kondisi penerima manfaat yang mempunyai keterampilan pekerjaan untuk dapat memiliki mata pencaharian atau memiliki penghasilan secara normatif.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Bimbingan Keterampilan Perbengkelan Las. 4. Bimbingan Keterampilan Tata Boga. 5. Bimbingan Keterampilan Menjahit. 6. Bimbingan Keterampilan Membatik. 	
4.	Bimbingan Mental Spritual	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Beribadah 2. Bimbingan Toleransi Beragama 3. Ceramah Kerohanian 4. Peringatan Hari Besar Keagamaan. 	Peningkatan kemampuan melaksanakan ibadah keagamaan dan peningkatan ketahanan sosial penerima manfaat berkaitan dampak buruk lingkungan sosial serta peningkatan toleransi dalam beragama.
5.	Bimbingan Fisik dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Medis 2. Bimbingan Olahraga 3. Bimbingan Perawatan Diri 	Tercapainya kondisi fisik penerima manfaat yang optimal seperti segar, dan sehat.
6.	Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial	<p>Bimbingan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Sosial Perseorangan 2. Bimbingan Sosial Kelompok seperti permainan dan dinamika kelompok 3. Bimbingan Sosial Masyarakat (kerja bakti, berpartisipasi, dalam peringatan hari besar/nasional) 	<p>Tercapainya memulihkan dan pengembangan perilaku positif bagi penerima manfaat, sehingga berkeinginan untuk mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam berkaitan erat dengan bagian anggota keluarga dan masyarakat seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dua arah. 2. Memiliki kemampuan hubungan sosial yang baik

		Bimbingan Advokasi Kegiatan Asesmen Masalah, Kebutuhan dan Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki beradaptasi dengan lingkungan sosialnya 4. Memiliki kemampuan bekerja sama dengan masyarakat. <p>Untuk menumbuhkan kondisi penerima manfaat dalam memberikan pentingnya kebutuhan advokasi sosial</p>
7.	Pelayanan Aksesibilitas	Pelayanan Kursi Roda, Tongkat Bertumpu, Poliklinik, dan Ambulans	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung bagi para penerima manfaat yang memiliki disabilitas sebagai fungsi aksesibilitas 2. Membantu dan mendampingi penerima manfaat yang mempunyai kedisabilitas.
8.	Bantuan dan Asistensi Sosial	Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui penyelenggaraan Pelatihan Atensi Kementerian Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya pemberian bantuan untuk penerima manfaat dalam rangka pengembangan usaha 2. Mendampingi penerima manfaat dan dalam pengembangan usahanya yang telah diberikan tersebut.
9.	Bimbingan Resosialisasi	Penyaluran penerima manfaat ke dunia usaha Persiapan untuk purna bina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan penerima manfaat purna bina supaya dapat mampu untuk diterima kembali pada lingkungan kehidupan bermasyarakat. 2. Mempersiapkan masyarakat dan keluarga untuk menerima penerima manfaat tersebut.

			3. Pemantapan masyarakat melalui belajar bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.
10.	Bimbingan Lanjut	Monitoring penerima manfaat purna bina.	Untuk memastikan para penerima manfaat purna bina supaya dapat memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan baik.

Sumber: Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, 2023

Program yang dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dimaksudkan supaya dampak yang dihasilkan dapat mencegah gelandangan dan pengemis untuk tidak kembali jalanan. Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang bertujuan untuk bagi setiap warga negara yang telah mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan ditandai dari terdiri dari yaitu mampu secara mandiri, menyelesaikan permasalahan dan turut ikut serta dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena berbagai bimbingan keterampilan, mental dan spiritual yang telah diberikan memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Tabel 1.5 Penerima Manfaat Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Tahun 2019 – 2022

Tahun	Penerima Manfaat
2020	76
2021	94
2022	102

Sumber: PPS PGOT Mardi Utomo yang diolah peneliti, 2023

Jumlah Penerima Manfaat Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo selama tahun 2019 – 2022 terdiri atas pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 mencapai 76 orang, tahun 2021 mencapai 94 orang dan tahun 2022 mencapai 102 orang. Sebelumnya para gelandangan dan pengemis yang memasuki Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo untuk menjadi penerima manfaat. Kondisi mereka sebelum mengikuti program rehabilitasi sosial ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kurangnya bekal keterampilan dan pendidikan, sikap malas, tidak menginginkan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan ketergantungan pada kehidupan yang disediakan oleh lembaga pemerintah untuk memperoleh cara yang instan. Oleh karena itu, Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang merupakan strategi yang baik dalam melakukan penanganan PGOT di Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, dalam menjalani pelaksanaan program rehabilitasi sosial melalui Panti Pelayanan PGOT Mardi Utomo Semarang terdapat adanya permasalahan untuk menanggulangi permasalahan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Tabel 1.6 Jumlah Penerima Manfaat yang Sudah Bekerja atau Kembali ke Keluarga dan Masih Dibina Selama Tahun 2020 - 2022

No	Keterangan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Sudah Bekerja/Mandiri	29	35	46
2.	Kembali ke Masyarakat	50	34	33

Sumber: PPS PGOT Mardi Utomo, 2023

Jumlah penerima manfaat yang sudah bekerja dari total keseluruhan rincian penerima manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat diketahui selama tahun 2020 yaitu dengan jumlah penerima manfaat yang mengikuti program sebesar 76 orang dan jumlah penerima manfaat mandiri mencapai 29 orang atau 38,1%. Tahun 2021 diketahui bahwa jumlah penerima manfaat yang mengikuti program sebesar 94 orang dan penerima manfaat yang berhasil mandiri mencapai 35 orang atau 37,2%. Pada tahun 2022 diketahui bahwa jumlah penerima manfaat yang mengikuti program mencapai 102 orang dan jumlah penerima manfaat yang berhasil mandiri mencapai 46 orang atau 45%. Setelah mengikuti program rehabilitasi sosial, penerima manfaat purna bina yang telah berhasil mandiri dapat diketahui mendirikan usaha, memiliki mata pencaharian normatif atau sesuai dengan norma dan kaidah berperilaku masyarakat dan tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Akan tetapi, terdapat jumlah penerima manfaat yang sudah bekerja atau mandiri telah selesai memperoleh program rehabilitasi sosial belum mencapai 100% dari total keseluruhan jumlah penerima manfaat. Tetapi kenyataannya, Berdasarkan pengamatan awal melalui wawancara lisan dengan Pekerja Sosial Professional Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena mereka belum mempunyai keberfungsian sosial seperti untuk mandiri dan mampu menangani permasalahannya sendiri. Sehingga, pemberian program rehabilitasi sosial yang dapat diterapkan sebagai mata pencaharian normatif/sumber penghasilan setelah purna bina ini dapat dikatakan belum memberikan dampak yang maksimal.

Tabel 1.7 Jumlah Penerima Manfaat yang Lebih Dari Sekali Masuk ke PPS PGOT Mardi Utomo Selama Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Penerima Manfaat
1.	2019	0
2.	2020	1
3.	2021	5
4.	2022	10

Sumber: PPS PGOT Mardi Utomo, 2023

Jumlah penerima manfaat yang lebih dari sekali masuk ke Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo selama tahun 2019 – 2022 terdiri atas pengemis, gelandangan dan orang terlantar dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2021 terdapat

gelandangan dan pengemis menerima lebih dari sekali program diantaranya seperti gelandangan sebesar 4 orang dan pengemis sebesar 1 orang. Pada tahun 2022 terdapat gelandangan dan pengemis menerima lebih dari sekali program yang meningkat diantaranya seperti gelandangan sebesar 7 orang dan pengemis sebesar 1 orang. Sehingga, jumlah penerima manfaat yang lebih dari satu kali memasuki Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo ini mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penerima manfaat purna bina yang telah selesai memperoleh program rehabilitasi sosial ini belum mampu untuk mencapai keberfungsian sosial yaitu kemandirian. Hal ini disebabkan karena mempunyai perilaku ketergantungan pada fasilitas Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo untuk menginginkan hidup enak dengan cara yang instan. Sehingga, dari data yang dijelaskan tersebut menjadikan sebagai salah satu alasan untuk berfokus pada kriteria jenis PGOT yaitu gelandangan dan pengemis.

Tabel 1.8 Jumlah penerima manfaat yang lebih dari jangka waktu penerimaan pelayanan di PPS PGOT Mardi Utomo yang masuk pada tahun 2019 -2021

Jumlah penerima manfaat yang lebih dari jangka waktu penerimaan pelayanan keluar pada tahun 2020	
Tahun	Penerima Manfaat
2019 – 2020	50
2020	16
Total Keseluruhan	66
Jumlah penerima manfaat yang lebih dari jangka waktu penerimaan pelayanan keluar pada tahun 2021	
2019 – 2021	16
2020 – 2021	17
2021	8
Total Keseluruhan	41
Jumlah penerima manfaat yang lebih dari jangka waktu penerimaan pelayanan keluar pada tahun 2022	
2019 – 2022	19
2020 - 2022	20
2021 - 2022	33
Total Keseluruhan	72

Sumber: PPS PGOT Mardi Utomo, 2023

Jumlah penerima manfaat yang melebihi jangka waktu penerimaan pelayanan selama tahun 2019 – 2022, sebagian besar dialami oleh jenis kriteria PGOT yaitu gelandangan dan pengemis. Dengan melebihi jangka waktu penerimaan pelayanan dapat diindikasikan bahwa penerima manfaat purna belum dapat mencapai kemandirian untuk purna bina supaya dapat mampu menerapkan segala kegiatan program rehabilitasi sosial. Hal ini

disebabkan karena melalui hasil evaluasi masing – masing perkembangan belum dapat dikatakan berfungsi sosial. Sehingga diperpanjang proses pelayanan agar dapat menghasilkan dampak yang maksimal untuk keberlanjutan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dicantumkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yaitu mengapa penerima manfaat dari Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo yang telah memperoleh program rehabilitasi sosial belum dapat mencapai kemandirian? Dengan demikian dapat ditarik judul penelitian yaitu **“Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat identifikasi masalah penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatnya jumlah penerima manfaat terutama gelandangan yang berada pada Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.
2. Masih terdapat jumlah penerima manfaat terutama gelandangan dan pengemis yang lebih dari sekali masuk Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo atau belum mandiri.
3. Masih terdapat jumlah penerima manfaat terutama gelandangan dan pengemis yang melebihi jangka waktu penerimaan pelayanan atau belum mandiri.

4. Jumlah penerima manfaat yang telah memperoleh program rehabilitasi seperti penerima manfaat bekerja/mandiri belum mencapai 100 persen.
5. Masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang telah memperoleh program rehabilitasi sosial kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu tujuan supaya dapat menghasilkan penelitian dapat berjalan dengan baik dan tercapai. Adapun tujuan penelitian mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari pelaksanaan penelitian mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi dalam ilmu administrasi publik dan dapat memberikan pengetahuan demi kemajuan bangsa dan negara kedepannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk dapat mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan penulis dan pemahaman mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian juga dapat bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan acuan dalam metode penelitian dan perbandingan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan informasi mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial

Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya penelitian juga dapat memberikan pemahaman mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang.

3. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan referensi kepada pemerintah dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat dilakukan perbaikan pelayanan publik dengan baik dan tepat sasaran.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun acuan. Hal ini disebabkan karena untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian lainnya. Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian “Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah.” yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian II Sumantri, Faizal Pikri, Muhammad Aldi Lubis (2018). Penelitian ini berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. Penelitian ini bertujuan untuk dapat

mengetahui mekanisme organisasi dalam memberikan pembinaan melalui rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui mekanisme mendamping yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial bagi tuna wisma yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kegiatan yang diselenggarakan Balai Rehabilitasi dapat berpengaruh terhadap klien, walaupun hanya sedikit perubahan yang dialami oleh klien.

Dalam penelitian II Sumantri, Faizal Pikri, Muhammad Aldi Lubis dan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu teori efektivitas program dan lokus dalam penelitian yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua, sedangkan penelitian menggunakan teori evaluasi dampak, dan lokus dalam penelitian yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif dan fokus yang diamati yaitu program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

2. Penelitian Vivi Anggraini Subu, Ida Hayu Dwimawanti dan Tri Yuniningsih (2021). Penelitian ini berjudul Analisis Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan dan

Pengemis pada Dinas Sosial Kota Serang: Studi Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keberhasilan dan melakukan identifikasi faktor pendorong maupun penghambat suatu keberhasilan program dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar lembaga, tidak adanya tindakan lebih lanjut setelah menyelesaikan program, lemahnya kesadaran gelandangan dan pengemis mengikuti kegiatan program pembinaan dan pelatihan. Tetapi, anggaran yang diberikan dan evaluasi program tersebut dari segi kriteria pemenuhan evaluasi sudah cukup baik dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Dalam penelitian Mita Rachmawati, Ety Rahayu dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu teori evaluasi program dari William Dunn beserta lokus yang diamati yaitu Dinas Sosial Kota Serang. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi dampak dan lokus yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan yaitu kualitatif dan fokus yang diamati yaitu program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

3. Penelitian Maryatun, Santoso Tri Raharjo, Budi Muhammad Taftazani (2022). Penelitian berjudul Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan gelandangan pengemis pada panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo yang dapat dilakukan secara kompherensif melalui berbagai tahapan pelayanan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan peningkatan penangaan gelandangan pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis telah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam pelaksanaan setiap sistem kesejahteraan sosial dan bentuk pelayanan sosial melalui program rehabilitasi sosial.

Dalam penelitian Maryatun, Santoso Tri Raharjo, Budi Muhammad Taftazani dengam penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu Implementasi Kebijakan. Sedangkan, penelitian ini menggunakan

fokus yang diamati yaitu penanganan gelandangan dan pengemis, teori yang digunakan yaitu evaluasi dampak, lokus yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

4. Penelitian M. Zain Yaumil Akbar (2018). Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Brebes Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus Desa Grinting). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika mengatasi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menghadapi Gelandangan dan Pengemis yang berhubungan dengan persektif Desa Grinting sebagai Desa Pengemis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bagi sebagian warga Desa Grinting, gelandangan dan pengemis dapat menjadi sumber penghasilan karena mendapatkan uang dengan mudah yang disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan.

Dalam penelitian M. Zain Yaumil Akbar dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu teori peran, fokus yang diamati yaitu Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menanggulangi PMKS pada gelandangan dan pengemis dan lokus yang diteliti yaitu Desa Grinting, sedangkan penelitian ini menggunakan teori evaluasi

dampak, dan lokus yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

5. Penelitian Raden Mahendra Haryo Bharoto dan Nursahidin (2021). Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Penanganan Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi kebijakan berkaitan dengan aparatur daerah dalam penanganan PGOT dan koordinasi dengan instansi yang berkaitan mengenai penanganan tersebut. Penelitian ini menggunakan eksplorasi dan kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan penanganan PGOT berkaitan dengan permasalahan pelayanan sosial, kesehatan, kependudukan, administrasi dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam penelitian Raden Mahendra Haryo Bharoto dan Nursahidin dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan dan fokus yang diamati yaitu Peraturan Program Penanganan Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori yaitu evaluasi dampak program, fokus yang diamati yaitu program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis,

serta dan lokus yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan dalam penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif.

6. Penelitian Nindya Khasna A, Tri Yuniningsih (2022). Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Demak. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dijalani belum berhasil disebabkan karena ditemukan belum adanya kesesuaian mengenai program dengan organisasi pelaksana, keahlian maupun kemampuan yang dimiliki setiap unit organisasi pelaksana, kemanfaatan program belum dapat dirasakan oleh penerima manfaat secara penuh (Yuniningsih, 2022).

Dalam penelitian Nindya Khasna A, Tri Yuniningsih dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan yaitu evaluasi program fokus yang diamati yaitu Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan lokus yang diteliti yaitu di Kabupaten Demak, sedangkan penelitian ini menggunakan teori yaitu evaluasi dampak, fokus yang diamati yaitu program

rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan lokus yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan dalam penelitian yaitu metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.

7. Penelitian Widha Dessy Ardiana, Hempri Suyatna, (2020) yang berjudul Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tujuan program rehabilitasi sosial masih belum dapat tercapai. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program rehabilitasi sosial belum tercapainya tujuan karena sumber yang tidak memadai, metode yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan belum tepat dengan kondisi yang ada, dan ditemukan ada porang yang menerapkan program ini yang tidak sesuai dengan tujuan yaitu tidak memperoleh dampak yang diinginkan.

Dalam penelitian Widha Dessy Ardiana, Hempri Suyatna, Dr., S.Sos., M.Si dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan yang mendasari. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu model evaluasi Context, Input, Process and Product CIPP, dan faktor penghambat dan pendukung program, fokus yang diamati pada penyelenggaraan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis serta lokus yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini

menggunakan teori evaluasi dampak, fokus yang diamati yaitu dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis serta lokus yaitu Provinsi Jawa Tengah. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan yaitu kualitatif.

8. Penelitian Cyntia Ratna Ayu Ariani, dan. Tri Winarni Soenarto Putri (2018). Penelitian yang berjudul Dampak Program Rehabilitasi Sosial Lanjutan Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Laras Yogyakarta). Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang dirasakan bagi gelandangan dan pengemis setelah memperoleh program rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan program rehabilitasi sosial memberikan dampak sosial, ekonomi, dan fisik bagi warga binaan yang berarti menghasilkan dampak positif memberikan perubahan pada dalam dirinya dan dampak negatif yang tidak memberikan perubahan apapun atau menimbulkan pengaruh buruk antar warag binaan di Balai Rehabilitasi Soisla Bina Karya Laras Yogyakarta.

Dalam penelitian Cyntia Ratna Ayu Ariani, dan Tri Winarni Soenarto Putri dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan yaitu teori dampak, lokus yang diteliti yaitu Daerah Istimewa

Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini terdapat lokus yang diamati yaitu Provinsi Jawa Tengah, teori yang digunakan yaitu evaluasi dampak. Kesamaan antar kedua penelitian terletak pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan fokus yang diamati yaitu program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

9. Penelitian Yanuar Farida Wismayanti, Husmiati Yusuf, Alit Kurniasari dkk (2021). Penelitian yang berjudul *Social Rehabilitation for Vagrants and Beggars Through Institutional Approach in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis oleh pemerintah dan masyarakat, pencapaian tingkat keberfungsian sosial dan peranan pekerja sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil Penelitian yaitu proses pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis memiliki perbedaan standar pelayanan antar institusi, keterbatasan SDM dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama yang terbatas antar Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian Yanuar Farida Wismayanti, Husmiati Yusuf, Alit Kurniasari dkk terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak lokus yang diteliti yaitu melakukan pengambilan sampel pada beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera

Utara, dan Sulawesi Selatan, metode yang digunakan kuantitatif dan kualitatif, teori yang digunakan berfokus pada rehabilitasi sosial. sedangkan penelitian ini terdapat pada dan lokus yang diteliti yaitu Provinsi Jawa Tengah, metode yang digunakan kualitatif, dan teori yang digunakan yaitu evaluasi dampak. Kesamaan fokus yang diamati yaitu program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

10. Raden Mahendra Haryo Bharoto, Iin Indrayati, dan Nursahidin (2019). Penelitian ini berjudul *Beggars, Homeless, and Displace People: Psycho-Social Phenomena and the Implementation of Local Government Policy*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan daerah terutama dengan dirumuskan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah terkait beserta mengetahui setiap kendala dalam melakukan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terhadap Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar (PGOT) belum berjalan secara optimal.

Dalam penelitian Raden Mahendra Haryo Bharoto, Iin Indrayati, dan Nursahidin dengan penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan. Perbedaan terletak lokus yang diteliti

yaitu Kota Cirebon, fokus yang diamati yaitu Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar dan teori yang digunakan yaitu Implementasi Kebijakan. Sedangkan fokus yang diamati yaitu program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis, lokus diamati yaitu Provinsi Jawa Tengah dan teori yang digunakan yaitu evaluasi dampak. Kesamaan antar kedua penelitian terletak metode penelitian yaitu kualitatif.

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam rangka mengetahui setiap ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan topik yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu dijadikan sebagai pembandingan antara tulisan penulis pada penelitian ini dengan tulisan penelitian lainnya. Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu yang diatas diantaranya telah dijelaskan bahwa program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah masih ditemukan hambatannya seperti kekurangan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia beserta bahan, komunikasi, kolaborasi yang terbatas Selain itu, berdasarkan beberapa jurnal juga menjelaskan bahwa dampak dari program rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penerima manfaat belum dapat dirasakan secara penuh. Sehingga, manfaat dari penelitian terdahulu bagi penelitian ini adalah sebagai urgensi peneliti untuk mengangkat penelitian dengan topik program rehabilitasi dalam gelandangan dan pengemis Tengah karena pada penelitian terdahulu sebelumnya diperoleh terdapat keberjalanan program yang kurang berjalan

optimal dan tidak memberikan dampak yang penuh kepada para penerima manfaat.

Persamaan dan perbedaan antara peneliti dan studi penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tema yang sama berkaitan dengan program rehabilitasi sosial Berdasarkan sembilan dari sepuluh penelitian menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini ingin berfokus pada mengevaluasi dampak dari program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis beserta menganalisis faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) Administrasi publik merupakan suatu mekanisme yang dimana sumber daya dan petugas pemerintahan secara terorganisasi dan terkordinasi untuk melakukan formulasi, implementasi dan mengatur ketetapan dan kebijakan publik. Administrasi publik bertujuan untuk dapat menyelesaikan suatu problematika yang berkaitan dengan publik melalui pembenahan yang berfokus pada aspek organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Administrasi publik dapat diartikan sebagai suatu susunan dan melaksanakan setiap kebijakan yang dilaksanakan dalam suatu birokrasi pada jumlah yang besar demi kepentingan masyarakat atau publik.

Administrasi publik adalah suatu mekanisme yang menangani pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memberikan arahan keahlian dan berbagai teknik untuk memberikan arahan dan maksud yang berkaitan dengan usaha masyarakat (Yuniningsih, 2019). Administrasi publik bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai kaitan antara pemerintah dengan publik untuk peningkatan tanggung jawab mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik melembagakan tindakan manajerial supaya dapat melakukan suatu aktivitas secara rasional, efektif, dan efisien. Selain itu, administrasi publik juga memiliki peranan yang penting dalam suatu negara.

Pada dasarnya, ruang lingkup dari administrasi publik dapat sesuai dengan berkembangnya kebutuhan maupun beragam permasalahan yang dialami setiap publik. Selain itu, jika ingin mengetahui ruang lingkup dari administrasi publik yaitu dapat melakukan pengamatan berbagai organisasi departemen maupun non departemen yang dimiliki oleh pusat dan daerah. Menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) dapat mengetahui ruang lingkup yang diketahui dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Organisasi Publik memiliki prinsip untuk berkaitan dengan berbagai bentuk departemen dan tindakan pemerintahan.
2. Manajemen Publik berkaitan dengan sistem dan ilmu bisnis, penilaian dan program produktivitas, keuangan publik dan manajemen SDM.

3. Implementasi berkaitan dengan perspektif mengenai kebijakan publik dan pelaksanaannya, swasta, dan perilaku birokrasi.

Administrasi Publik dapat dikatakan sebagai *the work of government* yang memegang peranan penting untuk dapat memberikan dampak yang besar dan penting bagi suatu pemerintahan ataupun negara (Keban, 2014). Administrasi merupakan suatu ruang lingkup bagi pejabat pemerintah untuk dapat menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik yang berfokus bagi kepentingan masyarakat, sehingga administrasi publik dapat memiliki peranan untuk menjadi stabilitas, ketahanan dan kemakmuran negara. Dengan melalui administrasi publik dapat mengetahui berbagai pembuktian para pejabat pemerintahan untuk dapat memberikan komitmen pelayanan kepada masyarakat yang telah menentukan pilihan mereka, sehingga administrasi publik dapat berperan besar pada *public trust*.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan disiplin ilmu dapat diketahui dari perubahan paradigma – paradigma. Menurut Kuhn (dalam Keban, 2014) Paradigma mencakup nilai, metode, perspektif, prinsip, dan strategi untuk memecahkan masalah yang berkaitan pada suatu masyarakat ilmiah tertentu. Dalam disiplin ilmu administrasi publik terdapat pergeseran paradigma – paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut.

1. Paradigma 1 (1900 – 1926): Dikotomi Politik dan Administrasi.

Goodnow menyatakan bahwa Kebijakan atau ekspresi dari rakyat merupakan fokus perhatian utama untuk politik. Selain itu, Administrasi berkonsentrasi pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Implikasi dari paradigma dikotomi politik dan administrasi merupakan administrasi dapat diketahui sebagai nilai bebas yang dapat difokuskan pada mendapatkan nilai efisiensi dan perekonomian dari adanya *government bureaucracy*. Paradigma ini hanya berfokus pada lokus dari *government bureaucracy* dibandingkan dengan fokus maupun metode yang dikembangkan, sehingga paradigma ini kurang terperinci (Keban, 2014).

2. Paradigma 2 (1927 – 1937): Prinsip – Prinsip Administrasi Publik
Prinsip – prinsip administrasi disebut sebagai fokus administrasi publik yang berupa POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang dapat diterapkan secara universal atau dimana saja. Lokus paradigma ini tidak dijelaskan secara mendalam karena percaya bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di mana saja, termasuk lembaga pemerintah. Paradigma ini menekankan pada focus dibandingkan locusnya (Keban, 2014).

3. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Paradigma ini menjelaskan terdapat timbulnya pertanyaan antara pemisahan administrasi dan politik sebagai suatu yang tidak dapat diterapkan dan tidak konsistennya prinsip administrasi

publik serta tidak dapat diterapkan secara universal. John Gaus menekankan pada administrasi publik merupakan ilmu politik. Paradigma ini menjelaskan bahwa lokusnya merupakan biokrasi pemerintahan dan lokusnya menjadi tidak terlihat yang disebabkan karena prinsip administrasi publik memiliki kekurangan. Sehingga, administrasi Publik mengalami krisis identitas yang disebabkan oleh dominasinya ilmu politik pada dunia administrasi publik (Keban, 2014).

4. Paradigma 4 (1956-1970): Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik

Paradigma ini mempunyai yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, menerapkan teknologi modern yang menjadi fokus dari paradigma administrasi publik. Ada kemungkinan bahwa setiap fokus yang disebutkan di sini dapat diterapkan tidak hanya pada bisnis tetapi juga pada administrasi publik yang berdampak pada lokusnya tidak jelas (Keban, 2014).

5. Paradigma 5 (1970): Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Dalam paradigma ini, fokus administrasi publik terdiri dari teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Kemudian, lokus administrasi publik adalah masalah dan kepentingan publik. (Keban, 2014).

6. Paradigma 6: *Governance*

Paradigma ini menjelaskan pada mekanisme, nilai, kebijakan, serta kelembagaan berkaitan dengan segala urusan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat diatur melalui interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis swasta. Paradigma ini menekankan sistem dan proses yang berhubungan dengan masyarakat dan kelompok, yang menyebutkan bahwa kepentingan media segala perbedaannya dan menjalani hak dan kewajibannya. Inti dari paradigma governance ini merupakan memperkuat hubungan interaksi dari seluruh aktor yang terlibat dalam melakukan promosi mengenai *people-centered development* (Keban, 2014).

Dalam penelitian ini dari keseluruhan paradigma yang telah dijelaskan bahwa yang akan digunakan yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Penelitian akan menggunakan teori kebijakan publik terutama evaluasi kebijakan publik dengan pembahasannya yang berkaitan pada evaluasi dampak kebijakan.

1.6.3 Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (dalam Handoyo, 2012) kebijakan publik merupakan salah satu aspek dalam suatu negara yang harus diperhatikan. Apabila suatu pemerintah tidak berjalan dengan kebijakan publik yang menyebabkan karena setiap suatu pemerintahan akan dikelola oleh individu maupun sekelompok individu yang melakukan sebagai penguasa dengan tujuan sebagai kepuasan kepentingan diri maupun kelompok. Kebijakan

publik merupakan suatu bentuk hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Negara memegang peranan yang penting sebagai suatu kekuasaan yang telah tercantum dalam hukum dan kebijakan publik juga menjadi kebijakan negara. Hal ini berarti kebijakan publik merupakan sebagai suatu perilaku yang dapat diinginkan oleh para pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat disetujui oleh masyarakat dapat teraih dengan baik.

Pada dasarnya, kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah. Menurut Thomas Dye (dalam Handoyo, 2012), kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai “*whatever government choose to do or not to do.*” Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik dapat dijadikan suatu berbagai keputusan pemerintah dalam melaksana atau tidak melaksanakan keputusan tersebut. Kebijakan publik adalah suatu cara pemerintah untuk menentukan pilihan dan tindakan yang telah dibentuk dalam rangka menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dengan berbagai pertimbangannya (Kusumawati, 2019). Pada umumnya, kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai suatu Tindakan aktor maupun sekelompok aktor dalam suatu fokus tertentu. Setiap sekelompok aktor untuk menjadi pembuat kebijakan yang telah menjadi sebagai suatu ciri khusus dengan adanya kebijakan publik.

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2012) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu langkah-langkah yang telah ditentukan oleh aktor maupun berbagai aktor untuk dapat menyelesaikan suatu

permasalahan. Menurut Chandler and Plano (dalam Keban, 2014:60), kebijakan publik merupakan suatu penggunaan yang terarah mengenai setiap sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan maupun publik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya arahan dari pemerintah untuk dapat membantu dan mengikutsertakan dalam pemerintahan agar tetap memiliki kehidupan yang baik.

Terdapat berbagai sifat dari kebijakan publik (Winarno, 2012) yaitu pertama, *policy decision* merupakan suatu tuntutan yang telah dibentuk oleh berbagai aktor yang terlibat diperuntukkan kepada setiap pejabat pemerintahan dalam suatu mekanisme politik. Kedua, *policy demands* merupakan suatu ketetapan yang telah dibentuk oleh suatu pejabat pemerintahan untuk dapat dilakukan pengesahan maupun arahan untuk melakukan berbagai tindakan publik. Ketiga, *policy statement* merupakan suatu pernyataan yang resmi dalam kebijakan publik seperti dekrit presiden, undang – undang, dan pidato pejabat pemerintahan.

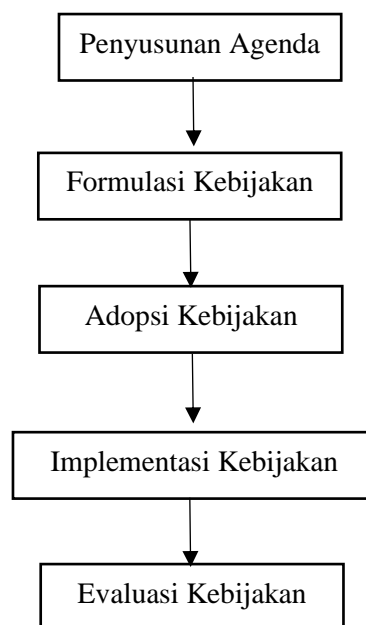
Dalam melakukan proses pembuatan mekanisme kebijakan publik dapat dijelaskan dengan keseluruhan mekanisme yang kompleks mengikutsertakan proses maupun variabel. Menurut Dunn, terdapat berbagai tahapan dalam kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

1. Menyusun agenda untuk kebijakan publik

Pada tahap ini dapat dilakukan penentuan sesuatu yang ingin menjadi permasalahan publik yang akan diselesaikan.

Dasar dari suatu permasalahan dapat ditetapkan melalui suatu prosedur yang dapat diketahui *problem structuring*. Akan tetapi, terdapat suatu masalah yang telah ditetapkan oleh pejabat untuk masuk ke dalam suatu diskusi dan masalah yang tidak akan dibahas.

Gambar 1. 1 Tahap - Tahap Kebijakan



Sumber: (Winarno, 2012:36)

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, suatu analis dapat melakukan penelusuran suatu berbagai pilihan kebijakan yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga, diperlukan adanya *forecasting* guna mengetahui setiap konsekuensi suatu kebijakan. Permasalahan yang telah dimasukkan dalam sebuah agenda kebijakan akan

dilakukan pencarian untuk mendapatkan suatu penyelesaian masalah yang terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, setiap pilihan kebijakan yang telah mendapatkan dukungan dari para legislator maupun administrator dan akan ditentukan melalui rekomendasi. Hal ini didapatkan dari keseluruhan alternatif kebijakan dan akan ditetapkan hanya satu kebijakan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu tahapan dalam sebuah kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan oleh keseluruhan setiap agen pemerintah dengan menghimpun dana dan setiap sumber daya yang tersedia. Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan ketika mendapat dukungan dari para pelaksana, akan tetapi terdapat yang tidak setuju dengan pelaksana kebijakan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahapan ini untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat untuk menyelesaikan masalah saat ini, evaluasi dan penilaian akan dilakukan untuk kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Sehingga, dengan tahapan evaluasi kebijakan akan dilakukan melalui ukuran dan kriteria yang menjadi acuan untuk dapat melakukan penilaian setiap

kebijakan publik yang telah memperoleh pengaruh sesuai dengan yang telah ditetapkan.

1.6.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dapat dijadikan sebuah penilaian mencapai kinerja dari pelaksanaan. Evaluasi bertujuan untuk dapat melakukan penilaian kebijakan publik secara efektif untuk dapat mempertanggung jawabkan anggota. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2012:229) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penilaian suatu kebijakan yang terdiri dari substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat diperuntukkan untuk dapat mengetahui penyebab kegagalan suatu kebijakan atau mengetahui Suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan dampaknya. Evaluasi kebijakan dapat menjadi panduan mengenai evaluasi yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, evaluasi kebijakan berisi aturan dan prinsip yang akan menentukan suatu organisasi maupun kelompok untuk dapat memanfaatkan setiap ketentuan panduan keputusan maupun perilaku saat melaksanakan evaluasi. Evaluasi kebijakan dapat menjadikan sebuah suatu aktivitas yang praktis. Hal ini berarti bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahapan yang terakhir, akan tetapi dilaksanakan pada mekanisme keseluruhan kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dijadikan dengan mencakup tahapan rumusan permasalahan kebijakan, program yang

telah ditetapkan untuk memecahkan masalah suatu kebijakan, implementasi maupun tingkatan tahapan dalam pengaruh kebijakan.

Menurut William N Dunn (dalam Agustino, 2008:187-188) yang berkaitan dengan suatu produk dalam informasi seperti nilai dan manfaat dari hasil kebijakan. Suatu hal dapat dianggap berharga dan bermanfaat untuk penilaian penyelesaian suatu masalah karena hasilnya dapat membantu tercapainya tujuan dan sasaran individu dan pengguna lainnya. Selain itu, dapat dikatakan bernilai dan bermanfaat apabila fungsi evaluasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga fungsi evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut.

1. Evaluasi kebijakan dapat memberikan informasi yang meyakinkan tentang kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan dapat termasuk yaitu pertama, sejauh mana nilai, kebutuhan, dan peluang telah dapat diraih melalui tindakan suatu kebijakan/program. Kedua, Apakah dari tindakan yang telah dijalankan oleh lembaga pelaksana telah benar – benar efektif, responsif, adil dan akuntabel. Ketiga, bagaimana dampak maupun efek dari kebijakan tersebut telah diterapkan.
2. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberikan kritik dan persyaratan terhadap bila yang digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran.

3. Evaluasi kebijakan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap penerapan metode analisis kebijakan termasuk rumusan masalah dan rekomendasi kebijakan.

1.6.5 Evaluasi Dampak

Menurut Dunn (dalam Febriana, 2017) terbagi menjadi kategori hasil kebijakan yang terdiri dari keluaran dan dampak. Keluaran adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan atau program yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran, seperti barang, jasa, dan sumber daya. Dampak merupakan suatu perubahan yang secara nyata dapat dirasakan oleh setiap masyarakat sebagai kelompok sasaran setelah menerima keluaran dari pengimplementasian sebuah program. Menurut Widodo (dalam Febriana, 2017) evaluasi dampak secara riset memiliki kaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat membawa perubahan yang diinginkan (*intendeed impact*). Tujuan riset berhubungan pada dampak yaitu untuk dapat menguji seberapa efektif program atau kebijakan dalam mencapai tujuan. Menurut Wahab (dalam Febriana, 2017) dampak dijelaskan suatu kajian mengenai akibat dari suatu kebijakan atau untuk mengetahui apa yang terjadi setelah kebijakan diterapkan.

Menurut Thomas Dye (dalam Winarno, 2016) menjelaskan bahwa dampak kebijakan atau *policy impact* dapat dikatakan juga sebagai *policy consequences* merupakan suatu keseluruhan dari efek kebijakan dan program yang timbul dalam situasi kehidupan nyata. Pada dasarnya, dampak kebijakan atau *policy outcomes* memiliki perbedaan dengan hasil

kebijakan (*policy output*). Suatu dampak kebijakan tidak ditujukan untuk melakukan pengukuran suatu manfaat kebijakan pemerintah dan evaluasinya ditujukan untuk menentukan identitas perubahan dalam aktivitas birokrasi pemerintahan. Selain itu, hasil kebijakan berhubungan dengan aktivitas pemerintah yang dapat dilihat dari setiap anggaran yang telah ditentukan. Sehingga, evaluasi kebijakan dapat menjelaskan bahwa pengumpulan informasi dan data berkaitan hasil pelaksanaan dan dampak kebijakan.

Suatu evaluasi kebijakan dapat dilakukan sehubungan dengan perubahan masyarakat. Dampak yang terjadi dan dampak dari suatu kebijakan dapat ditinjau. Biasanya, dampak kebijakan akan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan yang disebabkan oleh suatu ikatan dengan ketidakpastian lingkungan dan kemampuan dalam administrasi untuk melakukan suatu kebijakan. Menurut (Islamy, 2000) menjelaskan bahwa dampak kebijakan adalah suatu akibat dan konsekuensi yang muncul karena dilaksanakan suatu kebijakan tersebut.

Menurut Ripley (dalam Kusumanegara, 2010: 134 – 137) menjelaskan bahwa terdapat empat fokus dimensi utama dari dampak yaitu sebagai berikut.

1. Waktu

Pada dasarnya, dimensi waktu merupakan suatu persoalan yang penting dalam melakukan analisis dampak. Semakin lama periode post initiator, atau periode setelah adanya dampak,

dapat dipelajari akan berpengaruh pada bertambahnya kesulitan untuk mengukur dampak. Apabila efek terhadap setiap individu dipelajari secara lama, akan menimbulkan adanya masalah praktis yaitu kesulitan dalam menjaga *track* (jejak data) suatu individu dalam kurun waktu yang lama. Sehingga, peneliti memerlukan adanya jangka waktu penelitian.

2. Hubungan dampak aktual dengan bakal dampak

Dalam analisis dampak, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya tingkat pencapaian program dan apa yang diraih. Tetapi juga konsekuensi yang akan terjadi jika program memperoleh hanya sedikit yang diraih atau bahkan tidak dapat diraih manfaat sama sekali.

3. Tingkat agregasi dampak

4. Dampak suatu program terhadap individu dapat dipelajari, dan dampak pencapaian tingkat individual ini dapat diagregasi atau rata-rata serta dapat dianalisis. Hal ini dapat digunakan berbagai pendekatan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada kelompok yang lebih luas. Tipe – tipe dampak
Dalam suatu dampak, terdapat beberapa tipe – tipe utama yaitu sebagai berikut.

1. Dampak pada kegiatan ekonomi.
2. Dampak pada mekanisme pembuatan suatu keputusan.

3. Dampak pada sikap publik seperti dukungan melalui sistem politik.
4. Dampak pada kualitas kehidupan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2005:128) untuk melaksanakan evaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan, terdapat metode evaluasi yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut.

1. *Single program after-only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran setelah pelaksanaan program.
2. *Single program before-after* yaitu informasi yang diperoleh dari perubahan keadaan sasaran baik sebelum maupun sesudah program.
3. *Comparative after-only* yaitu informasi yang dikumpulkan berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dari program yang dijalankan.
4. *Comparative before-after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran baik sebelum maupun sesudah implementasi program.

Tabel 1.9 Metode untuk Evaluasi Program

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single program after only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan Kelompok Sasaran
<i>Single program before-after</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
<i>Comparative after-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol
<i>Comparative before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol

Sumber: Finsterbusch dan Motz (dalam Subarsono, 2005:130)

Dalam penelitian evaluasi program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode *single program before-after*. Penelitian ini mengevaluasi suatu program dengan melihat perubahan kondisi sebuah kelompok sasaran sebelum dan sesudah program itu dilaksanakan.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam (Anggara, 2014:282) terdapat adanya beberapa unit sosial yang terkena dampak kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1. Dampak Individual: merupakan dampak yang berkaitan dengan segala hal – hal biologis (contoh: penyakit, cacat fisik karena kebijakan

teknologi nuklir), psikologis (stress, depresi dan emosi), lingkungan hidup (tergusur atau pindah rumah), ekonomi (naik-turunnya penghasilan, harga dan keuntungan) dan sosial serta personal.

2. Dampak Organisasional: dampak ini merupakan dampak langsung seperti terganggu atau tercapainya pencapaian suatu tujuan organisasi dan dampak tidak langsung seperti jika semangat kerja dan disiplin meningkat.
3. Dampak bagi Masyarakat: dampak ini melihat dari meningkatnya kesejahteraan.
4. Dampak bagi lembaga dan sistem sosial: dampak ini ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dan peningkatan solidaritas sosial.

Dalam penerapan kebijakan program rehabilitasi sosial yang memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial secara fisik, mental, dan sosial serta memberikan peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis akan berdampak pada individual para penerima manfaat. Penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Finsterbusch and Motz terdiri dari (1) dampak terhadap psikologis, (2) dampak terhadap lingkungan hidup (3) dampak terhadap ekonomi, dan (4) dampak terhadap sosial/personal.

1.6.6 Faktor Sumber Daya yang Mempengaruhi Proses Manajemen

Keberhasilan dalam suatu organisasi untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilakukan melalui beberapa unsur yang mendukung kegiatan manajemen. Sehingga, terdapat unsur – unsur manajemen yang menjadi suatu faktor yang mempengaruhi dalam proses manajemen. George R. Terry dalam Rohman (2017:12) menjelaskan bahwa enam unsur – unsur yang terkandung dalam sebuah manajemen, yaitu sebagai berikut.

1. *Man*: sumber daya manusia yang mempunyai pikiran, harapan beserta gagasan yang peranannya besar dalam menentukan keberdayaan pada unsur lainnya. Peningkatan sumber daya manusia merupakan sesuatu yang penting untuk dapat tercapainya penerapan manajemen dalam suatu organisasi ataupun personal dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan.
2. *Material*: Dalam mencapai segala kegiatan untuk melaksanakan proses manajemen membutuhkan adanya tujuan yang telah ditetapkan dengan memerlukan adanya bahan – bahan (material).
3. *Machines*: Mesin kerja sebagai pendukung sumber daya manusia dalam pelaksanaan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.
4. *Methods*: Dalam mencapai suatu tujuan dibutuhkan adanya pemilihan metode/cara yang tepat dari keseluruhan alternatif yang telah ditetapkan.
5. *Money*: keberadaan uang ini dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Unsur uang merupakan faktor yang penting dalam proses manajemen supaya dapat mengatur yang baik untuk memberikan dampak terhadap efisiensi.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam mencapai keberfungsian sosial bagi penerima manfaat purna bina. Peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry terdiri dari (1) Man, (2) Money, dan (3) Methods.

1.6.7 Gelandangan

Menurut Sarlinto W. (dalam Dewi, M, Margi, I, Sendratari, 2020) Gelandangan adalah kelompok orang miskin yang tinggal di daerah perkotaan dan tidak memiliki tempat tinggal yang sah maupun tetap. Dengan adanya keberadaan gelandangan, maka akan menjadi kesulitan bagi pemerintah yang disebabkan karena telah menggunakan setiap sarana dan prasarana perkotaan, namun masyarakat yang termasuk gelandangan tersebut tidak ikut serta dalam membayar pajak untuk dapat mendukung sarana dan prasaranan perkotaan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Gelandangan adalah orang – orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. setempat serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Menurut Muslim (dalam Dewi, M, Margi, I, Sendratari, 2020) Terdapat berbagai kriteria yang dimiliki oleh gelandangan yaitu sebagai berikut.

- a. Anak – anak yang telah berumur dewasa, tinggal tidak menetap maupun mengembara di tempat umum yang terjadi berada pada kota besar.
- b. Tanpa memiliki identitas pengenal atau KTP (Kartu Tanda Kependudukan).
- c. Tidak memiliki sebuah pekerjaan yang tetap dengan melakukan meminta atau mencari sisa makanan dan barang bekas yang ditemukan.

1.6.8 Pengemis

Menurut LP3ES (dalam Dewi, M, Margi, I, Sendratari, 2020) bahwa pengemis merupakan suatu individu yang mendapatkan pendapat dari kegiatan meminta dengan orang lain melalui memperoleh rasa kasihan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta – minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Pada dasarnya, menurut Muslim (dalam Dewi, M, Margi, I, Sendratari, 2020) pengemis memiliki berbagai kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- a. Berdiri dibawah terik matahari.
- b. Mengenakan baju dan celana dengan menggulungkan supaya dapat memberi bukti bahwa mereka cacat.

- c. Berbaring maupun duduk di tengah jalan supaya mendapat perhatian dari pengemudi yang melewati supaya dapat memudahkan pengemudi untuk memberikan uang kepada mereka.
- d. Gendong anak kecil untuk keperluan mengenis
- e. Biasanya dengan membawa kardus yang memiliki tulisan untuk membutuhkan uang sekolah dan kebutuhan hidup.

1.6.9 Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi merupakan suatu proses membantu seseorang yang mengalami gangguan fisik maupun mental dalam mengikutsertakan pada masyarakat supaya memiliki kemampuan yang baik dan tepat (Wismayanti et al., 2021). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial (2000) dalam (Syamsi & Haryanto, 2018) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang yang kehilangan peranan sosial untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan cara yang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan dari rehabilitasi sosial merupakan segala suatu upaya untuk memperoleh yaitu sebagai berikut.

1. Pemulihan rasa percaya diri, harga diri, kesadaran, dan tanggung jawab atas masa depan seseorang, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
2. Memulihkan keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kembali.

Sehingga, tujuan rehabilitasi sosial merupakan manusia baik sebagai individu dan berperan dalam masyarakat dan mampu menghadapi permasalahan dalam hidupnya dengan baik. Program rehabilitasi sosial dapat bertujuan bagi para penerima manfaat supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik yang ditandai penerima manfaat, memiliki kemampuan untuk mandiri, mampu menyelesaikan permasalahan, dan berpartisipasi dengan lingkungan sosialnya yang apabila dijelaskan secara rinci dari para ahli yaitu sebagai berikut.

1. Mandiri/Mampu menyelesaikan persoalan sendiri

Hal ini dapat diartikan bahwa gelandangan dan pengemis dapat mampu hidup mandiri berada di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Robert Havighurst dalam (Desmita, 2012) terdapat empat bentuk kemandirian yaitu pertama, mandiri secara emosi merupakan individu dapat memiliki keahlian untuk memiliki kendali atas emosinya dan tidak bergantung pada kebutuhan emosi pada orang lain. Kedua, kemandirian secara ekonomi yaitu individu dapat mengatur perekonomiannya dan tidak menggantungkan pada kebutuhan ekonomi dari orang lain.

Ketiga, kemandirian intelektual yaitu kemampuan untuk dapat melakukan hubungan dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi dari orang lain. Sehingga, gelandangan dan pengemis dapat hidup mandiri jika telah mandiri secara ekonomi, emosional, intelektual dan sosial.

2. Berpartisipasi dengan lingkungan sosialnya

Menurut Iskandar dalam (Ardiana, 2020) Gelandangan dan pengemis dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar apabila mereka mampu menjalankan peranan sosialnya dengan tepat berada pada lingkungan masyarakat. Gelandangan dan pengemis dapat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dalam lingkungan masyarakat, memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak dari orang lain, menjalani interaksi dengan baik dan memiliki kehidupan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yaitu tidak kembali hidup secara menggelandang dan mengemis untuk kehidupan sehari – hari.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, maka terdapat kegiatan yang dilaksanakan yaitu salah satu dari kegiatan tersebut merupakan tahapan rehabilitasi. Rehabilitasi dilaksanakan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan. Pelaksanaan bimbingan dapat diberikan secara individu atau kelompok. Rehabilitasi sosial memiliki potensi untuk meningkatkan

kesadaran individu tentang fungsi sosial dan meningkatkan potensi positif seperti minat dan bakat, yang dapat menyebabkan peningkatan harga diri dan kesadaran tanggung jawab sosial (Syamsi & Haryanto, 2018).

Rehabilitasi sosial merupakan suatu cara ataupun metode yang dapat dilakukan untuk menghubungkan kembali individu menuju kehidupan bermasyarakat melalui dapat membantu melakukan adaptasi diri dengan keluarga masyarakat dan pekerjaannya (Sihombing et al., 2020). Program rehabilitasi sosial adalah rangkaian aktivitas rehabilitasi yang saling berhubungan, mulai dari administrasi, ketenagaan, rehabilitasi, dan penyaluran. Hal ini dapat diarahkan dalam mendukung penerima manfaat dalam memperoleh kesejahteraan secara lahiriah dan rohaniah yang baik (Syamsi & Haryanto, 2018).

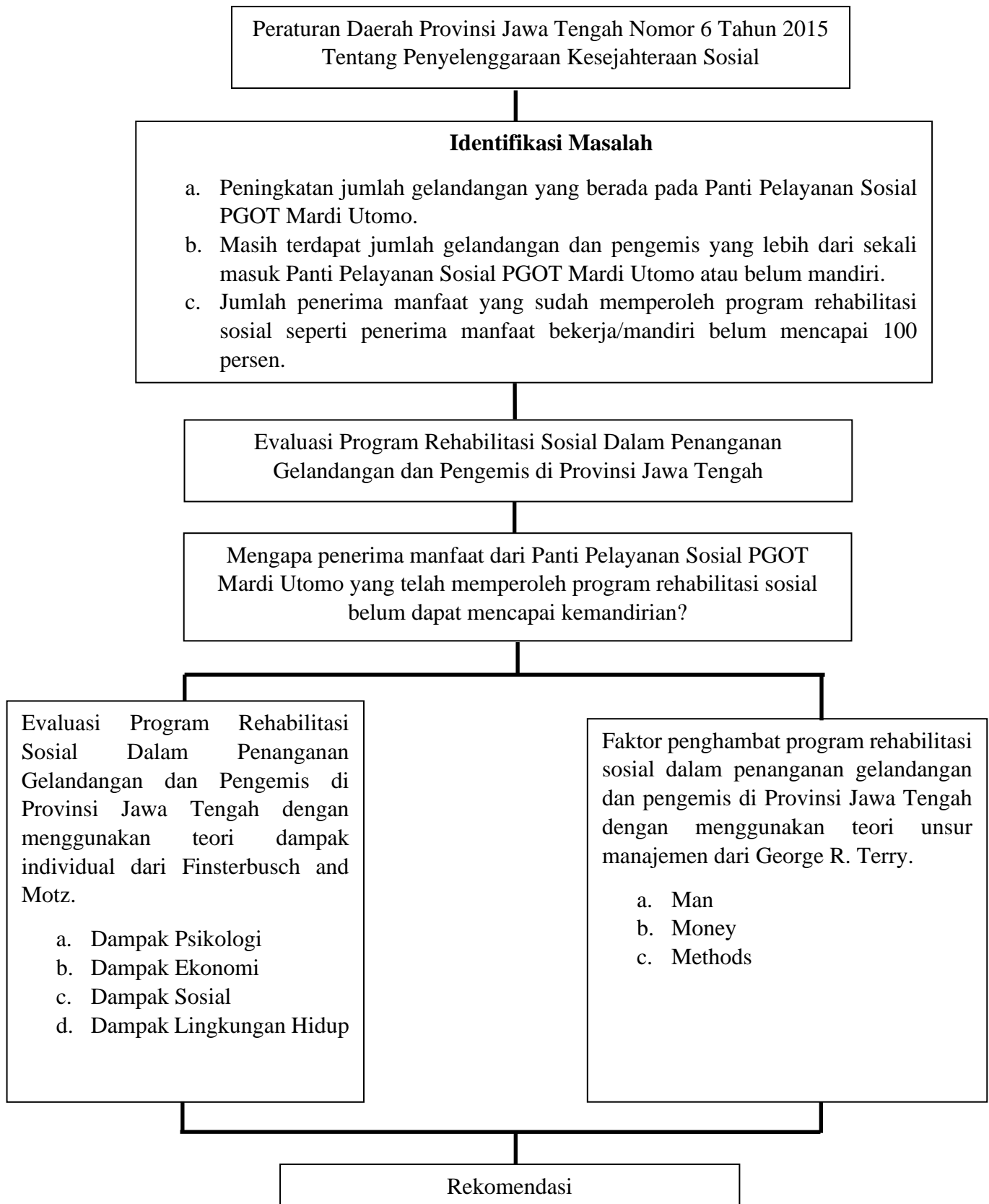
Rehabilitasi sosial diberikan kepada gelandangan dan pengemis untuk membantu mereka menentukan tujuan dan cara memperoleh pendapatan sesuai dengan peraturan dan norma masyarakat Individu dapat dikatakan telah berintegrasi bersama masyarakat apabila dapat mempunyai kemampuan maupun keahlian seperti fisik, mental, dan sosial serta dapat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Gelandangan dan pengemis diharapkan dengan adanya rehabilitasi sosial dapat melakukan peran sosial dengan cara yang tepat dan sesuai dengan masyarakat. Selain itu, rehabilitasi sosial dapat dijadikan untuk memiliki kaitan dengan kebutuhan sehari – hari supaya dapat memenuhi

kebutuhan sehari – hari, mendukung dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya dan mendukung tindakan yang sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku.

1.6.10 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian



1.7 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian dapat berguna bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian sesuai alur pikir dan memberikan kemudahan untuk melaksanakan teori – teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Kebijakan yang digunakan dalam evaluasi kebijakan ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam penelitian ini berfokus pada “Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah.” Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah beserta menganalisis faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Fenomena penelitian yang akan dilakukan pengamatan yaitu sebagai berikut.

1. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan evaluasi dampak dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz, yaitu sebagai berikut.

- a. Dampak Psikologi

Dampak psikologi dari penerima manfaat setelah memperoleh program rehabilitasi sosial. Gejala yang dapat diamati dari dampak psikis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kondisi pola pikir dan mental sebelum memperoleh program rehabilitasi sosial.

- 2) Perubahan pola pikir dan mental individu setelah memperoleh program rehabilitasi sosial.

b. Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi dari para penerima manfaat setelah memperoleh program rehabilitasi sosial. Gejala yang dapat diamati yaitu sebagai berikut.

- 1) Kondisi perekonomian sebelum memperoleh program rehabilitasi sosial.
- 2) Kemandirian ekonomi setelah memperoleh program rehabilitasi sosial.
- 3) Tingkat penghasilan individu setelah memperoleh program rehabilitasi sosial.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial dari para penerima manfaat setelah memperoleh program rehabilitasi sosial. Gejala yang dapat diamati yaitu sebagai berikut.

- 1) Kondisi sosial sebelum mengikuti program rehabilitasi sosial.
- 2) Perubahan sikap, perilaku atau kebiasaan hidup individu setelah memperoleh program rehabilitasi sosial.
- 3) Kemandirian sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.

d. Dampak lingkungan hidup

Dampak lingkungan hidup dari para penerima manfaat setelah memperoleh program rehabilitasi sosial. Gejala yang dapat diamati yaitu sebagai berikut.

- 1) Kondisi tempat tinggal sebelum memperoleh program rehabilitasi sosial.
- 2) Perubahan kondisi tempat tinggal setelah memperoleh program rehabilitasi sosial.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Faktor penghambat yang mempengaruhi proses manajemen program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Gejala yang diamati yaitu sebagai berikut.

a. *Man*

Faktor man (manusia) dalam organisasi berkaitan dengan ketersediaan dan keahlian manusia yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

b. *Money*

Ketersediaan ataupun realisasi dari sumber anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

c. *Methods*

Penentuan metode atau cara dalam melaksanakan setiap alternatif kegiatan program untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

1.8 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa metode penelitian adalah proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Metode penelitian merupakan suatu langkah—langkah yang melakukan penyusunan ilmu pengetahuan secara sistematis. Hal ini berarti bahwa penelitian harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional, empiris, dan sistematis. Selain itu, data yang diharuskan dalam penelitian yaitu dengan memiliki kriteria yang valid. Dengan adanya valid akan menunjukkan suatu kualitas ketepatan mengenai antara data yang sebenarnya dan objek data yang dikumpulkan peneliti. Setiap penelitian yang dilakukan akan mempunyai tujuan dan manfaat yang telah ditentukan.

Dengan adanya penelitian, maka akan mendapatkan hasil. Data penelitian tersebut dapat digunakan untuk memahami dan menyelesaikan suatu problematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Alat dari metode penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono (2019) Metode penelitian kualitatif yang didasarkan pada suatu teori positivisme dimanfaatkan dalam melakukan penelitian pada situasi objek yang alamiah yang menjadikan peneliti. Teknik gabungan digunakan untuk mengumpulkan data; metode analisis data dapat induktif atau kualitatif; dan hasil penelitian dapat berfokus pada arti generalisasi.

1.7.1 Tipe Penelitian

Beragamnya pengklasifikasian tipe – tipe penelitian akan dapat terlihat dengan melalui pengelompokan penelitian sesuai dengan tujuan

yang akan diperoleh. Menurut Nan Lin Terdapat tiga tipe penelitian yaitu penelitian eksplorasi, deskripsi dan eksplanasi menjadi tipe suatu studi. Dengan menentukan tipe penelitian tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pada masalah penelitian, sumber data yang tersedia, dan level pengetahuan mengenai masalah penelitian. (Mudjiyanto, 2018).

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian tipe deskriptif, yang berarti metode penelitian yang memberikan gambaran dan interpretasi objek sesuai kejadian dan fakta apa adanya (Mudjiyanto, 2018). Penelitian deskriptif kualitatif akan berfokus pada menelaah secara mendalam setiap sifat yang berbeda dan jenis kelompok manusia beda maupun kejadian. Dengan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti akan mengevaluasi dampak program rehabilitasi sosial dan menganalisis faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi yang dapat mendapatkan situasi sebenarnya dari objek yang diteliti agar peneliti mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan. Situs yang diperoleh oleh peneliti dilaksanakan di Pantii Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang. Hal ini dikarenakan Pantii Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo merupakan salah satu dari 27 jenis Pantii Sosial yang berada di

Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan penanganan yang berfokus hanya Gelandangan dan Pengemis. Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo termasuk pada Panti Pelayanan Sosial Kelas A sebagai pelaksana kebijakan dengan pendekatan profesi pekerja sosial. Selain itu, masih ditemukannya permasalahan dari dampak program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo yaitu banyaknya penerima manfaat yang belum mandiri seperti jumlah penerima manfaat lebih dari sekali memasuki Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo, jumlah penerima manfaat purna bina yang belum dapat mandiri secara 100% dari total keseluruhan penerima manfaat dan masih ditemukannya penerima manfaat purna bina yang kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan penelitian yaitu diantaranya sebagai berikut.

1. Subkoordinator Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.
2. Pekerja Sosial Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.
3. Penerima Manfaat Purna Bina Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.
4. Masyarakat.

Teknik *purposive sampling* akan digunakan untuk memilih informan penelitian supaya dapat menentukan informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kriteria peneliti untuk menetapkan informan adalah bekerja di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan mengetahui sistematika pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Penetapan informan dipilih karena informan memahami dan memiliki pengalaman pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah yang akan mendukung penelitian.

1.7.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data informasi berbentuk angka. Data kualitatif yaitu data yang dalam bentuk apapun berkaitan dengan kejadian maupun gejala yang tidak ditulis seperti hitungan, angka maupun jumlah. Data kualitatif dapat dilakukan pengamatan dan pencatatan. Dengan penelitian menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk melakukan Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Jawa Tengah dan faktor penghambat program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah.

1.7.5 Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sarwono (dalam Kusumastuti dkk, 2019) terdapat data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut.

1. Data primer berasal dari naskah wawancara yang dilakukan menggunakan informasi yang menjadi sampel penelitian. ini. Data ini dapat dilakukan perekaman maupun pencatatan.
2. Data sekunder merupakan data yang telah diakses dan dikumpulkan oleh penelitian melalui membaca, melihat maupun mendengarkan. Data sekunder yaitu teks (dokumen dan surat), gambar (foto dan animasi), dan campuran naskah, gambar dan suara (film dan video).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data merupakan suatu tahapan utama dalam melaksanakan sebuah penelitian, karena dalam penelitian ini memiliki sebuah tujuan utama yaitu memperoleh data. Terdapat teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2019) observasi merupakan sesuatu awalan dasar dari keseluruhan pengetahuan. Observasi merupakan sesuatu yang penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Dengan adanya observasi, maka peneliti dapat melakukan dokumentasi dan dugaan melalui sistematis mengenai setiap

aktivitas dan hubungan dengan subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk dapat melakukan analisis dan catatan terstruktur yang berkaitan dengan perilaku seseorang maupun kelompok secara langsung, kemudian akan mendapatkan gambaran secara luas mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Dalam suatu observasi dapat dilakukan teknik untuk mencari data dari berbagai sumber yaitu tempat, kegiatan, foto, dan benda. Observasi yang dilakukan saat proses penelitian dengan melihat dan mengamati kondisi para penerima manfaat purna bina Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.

2. Wawancara

Menurut Esberg (dalam Sugiyono, 2019) Wawancara adalah jenis pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan dengan menggunakan mekanisme tanya jawab untuk membentuk makna dalam suatu topik yang ditentukan. Teknik wawancara adalah suatu teknik dalam rangka mencari informasi melalui sebuah percakapan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu dari dua pihak maupun lebih (Farida, 2014). Pada dasarnya, teknik wawancara diterapkan oleh peneliti, karena mendapatkan banyaknya data, ketepatan data, dan mendalam. Wawancara dapat dijadikan sebagai suatu teknik pengumpulan data tentang bagaimana peneliti dapat melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

solusi untuk masalah yang akan diteliti; namun, peneliti akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang sesuatu dari informan.

3. Dokumen

Menurut Sugiyono (2019) Dokumen merupakan suatu isi kejadian yang telah lampau. Dokumen dapat memiliki bentuk seperti tulisan, gambar maupun karya berharga dari individu. Dokumen menjadi suatu pelengkap dari pemanfaatan metode penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara dan observasi. Terdapat isi dari dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan, gambar, film, arsip dan dokumen lainnya (Farida, 2014). Dokumen mengandung banyak catatan penting yang berkaitan dengan masalah, yang memungkinkan untuk mendapatkan data secara sah dan lengkap.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2019:244) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain secara terstruktur supaya dapat dipahami dan digunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang bersifat induktif yang berarti suatu analisis yang didasarkan pada sesuai dengan data yang didapatkan, kemudian akan dilakukan pengembangan menjadi suatu hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data biasanya dilakukan pada saat

pengumpulan data secara langsung dan dilakukan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun kegiatan – kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2019).

1. Reduksi Data

Setelah data lapangan dikumpulkan, akan mencapai jumlah yang banyak, kompleks dan sulit. Maka, akan dilakukan reduksi data yang berarti meringkas, menentukan sesuatu yang pokok, berorientasi menentukan sesuatu yang penting, pencarian tema dan polanya. Sehingga, reduksi data akan memudahkan peneliti untuk menerapkan teknik pengumpulan data

2. Penyajian Data

Kemudian, data yang telah di reduksi akan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat seperti tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Apabila melalui penyajian data, maka akan berpengaruh menjadi data dan bentuk pola dapat tersusun dan teorganisir dengan supaya mudah dimengerti. Teks naratif akan digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman yang sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dengan menyajikan data akan mempengaruhi pemahaman mengenai kejadian yang terjadi, membentuk perencanaan kerja kemudian sesuai dengan yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap awal, setelah membuat kesimpulan berdasarkan bukti data yang valid dan konsisten. Peneliti akan pergi ke lapangan untuk mengumpulkan data supaya membuat kesimpulan menjadi kredibel. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah temuan baru. Temuan ini menjadi suatu gambaran objek penelitian yang sebelumnya tidak menentu, setelah dilakukan penelitian menjadi jelas dapat seperti hubungan maupun teori.

Dalam penelitian kualitatif, *software* Atlas.ti ini akan digunakan untuk membantu proses analisis data. Selama pengolahan data, kode akan ditambahkan ke setiap data sehingga lebih mudah untuk mengingatkan kembali data tersebut sebagai bahan diskusi dalam penelitian dan dapat mengetahui hubungan antar data penelitian.. Atlas.ti memiliki metode yang membantu proses analisis data, seperti menyimpan data penelitian dengan rapi, mengorganisir data dengan baik.

1.7.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pengujian adalah datanya. Penelitian kualitatif memiliki suatu realita yang bersifat majemuk, selaku berubah – rubah, yang menjadi tidak konsisten dan akan selalu berulang seperti awal. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data. Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi merupakan suatu verifikasi data yang didapatkan dari

berbagai sumber, metode dan waktu. Adapun berbagai macam triangulasi yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2019).

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi ini melakukan pengujian kredibilitas dilaksanakan dengan berbagai verifikasi data yang didapatkan dari banyak sumber.
2. Triangulasi Teknik. Triangulasi ini melakukan pengujian kredibilitas data yang dilaksanakan dengan verifikasi melalui sumber yang sama dan teknik yang dibutuhkan berbeda dengan sebelumnya.
3. Triangulasi Waktu. Triangulasi ini dalam melakukan pengujian kredibilitas dilakukan verifikasi dengan melalui wawancara, observasi maupun teknik dalam suatu situasi dan waktu yang memiliki perbedaan. Apabila hasil ujinya terdapat perbedaan, maka dilakukan berulang hingga menemukan kebenaran datanya.

Penelitian ini akan triangulasi sumber dengan mengumpulkan semua sumber data. Hal ini dilakukan dengan melalui teknik yang sama yaitu wawancara berkaitan dengan evaluasi program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai narasumber seperti Subkoordinator Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial Professional dan Penerima Manfaat Purna Bina Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo.